



Article Informations
Corresponding Email:
jansyearianeuhedohari@gmail.com

Received: 29/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

KEBIJAKAN SANKSI SWISS SEBAGAI COERCIVE DIPLOMACY DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022–2024

Jansye Arianeu H

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sanksi Swiss terhadap Rusia dalam konteks konflik Rusia–Ukraina 2022–2024, dengan menggunakan teori Realisme Defensif oleh Kenneth Waltz dan konsep *Coercive Diplomacy* oleh John J. Mearsheimer. Sebagai negara netral, Swiss menghadapi tantangan besar dalam menanggapi tekanan global akibat agresi Rusia terhadap Ukraina. Meski memiliki tradisi netralitas yang kuat, Swiss memutuskan untuk mengadopsi sanksi Uni Eropa terhadap Rusia sebagai bentuk tekanan non-militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa keputusan Swiss merupakan langkah strategis yang merefleksikan diplomasi koersif serta bentuk respons defensif dalam mempertahankan stabilitas kawasan. Kebijakan sanksi tersebut juga menunjukkan adaptasi nilai netralitas Swiss terhadap tuntutan moral dan keamanan internasional.

Kata Kunci: Swiss, Kebijakan Sanksi, Diplomasi Koersif, Konflik Rusia–Ukraina, Realisme Defensif

Abstract

This study aims to analyze Switzerland's sanction policy against Russia in the context of the 2022–2024 Russia–Ukraine conflict using Kenneth Waltz's Defensive Realism theory and John J. Mearsheimer's concept of Coercive Diplomacy. As a neutral state, Switzerland faces significant pressure in responding to Russia's aggression. Despite its long-standing neutrality, Switzerland adopted EU sanctions against Russia as a form of non-military pressure. This study applies a qualitative case study approach and uses Miles and Huberman's data analysis model. The findings show that Switzerland's decision was a strategic move reflecting coercive diplomacy and a defensive response to maintain regional stability. The sanction policy also highlights Switzerland's reinterpretation of neutrality in response to international moral and security demands.

Keywords: Switzerland, Sanction Policy, Coercive Diplomacy, Russia–Ukraine Conflict, Defensive Realism

1. PENDAHULUAN

Invasi militer Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022 telah menjadi titik balik dalam keamanan Eropa pasca-Perang Dingin. Tindakan agresi tersebut menimbulkan gelombang kecaman dari komunitas internasional karena dianggap melanggar prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional. Sebagai respon, berbagai negara termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan sekutu lainnya memberlakukan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Rusia. Langkah ini menjadi bentuk tekanan non-militer terhadap Rusia dalam kerangka diplomasi koersif (*coercive diplomacy*) yang bertujuan untuk mengubah perilaku negara agresor melalui sanksi ekonomi, pembatasan perdagangan, dan isolasi finansial global (Mearsheimer, 2001).

Yang menarik dalam konteks ini adalah keterlibatan Swiss, negara yang selama lebih dari dua abad mempertahankan prinsip netralitasnya, turut serta mengadopsi sanksi terhadap Rusia. Pada 28 Februari 2022, Dewan Federal Swiss mengumumkan bahwa negara tersebut akan mengikuti langkah-langkah sanksi yang diterapkan oleh Uni Eropa sebagai respons terhadap agresi Rusia, termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap individu tertentu yang dekat dengan Kremlin (EDA, 2022). Keputusan ini menandai perubahan penting dalam kebijakan luar negeri Swiss yang selama ini dikenal netral secara permanen berdasarkan ketetapan Kongres Wina 1815 dan Konvensi Den Haag 1907.

Netralitas Swiss yang selama ini dianggap sebagai strategi defensif dalam menjaga stabilitas internal dan eksternal, kini memasuki era transformasi. Dalam lanskap global yang semakin kompleks, Swiss menghadapi dilema antara mempertahankan prinsip netralitas atau menanggapi tantangan geopolitik secara proaktif. Oleh karena itu, partisipasi Swiss dalam rezim sanksi terhadap Rusia menimbulkan pertanyaan teoritis penting: apakah tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari netralitas, atau justru ekspresi dari strategi *coercive diplomacy* yang defensif?

Dari perspektif realisme defensif yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz, tindakan negara dalam sistem internasional anarkis bertujuan untuk

mempertahankan eksistensi dan stabilitas, bukan memperluas kekuasaan. Negara bertindak rasional berdasarkan persepsi ancaman, dan strategi yang diambil cenderung bersifat reaktif serta berskala minimum untuk mempertahankan status quo (Waltz, 1979). Dalam konteks ini, Swiss dapat dipahami bukan sebagai pelaku ofensif, melainkan sebagai aktor yang merespon ancaman terhadap tatanan internasional dan stabilitas regional melalui tindakan non-militer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sanksi Swiss terhadap Rusia dalam periode 2022–2024 dengan menggunakan teori realisme defensif dan konsep *coercive diplomacy*. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana Swiss, sebagai negara netral, menggunakan sanksi sebagai alat diplomatik untuk menekan Rusia tanpa keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata. Penelitian ini juga berupaya menelaah transformasi makna netralitas dalam kebijakan luar negeri Swiss sebagai respons terhadap dinamika keamanan internasional.

2. PEMBAHASAN

Kebijakan Sanksi Sebagai *Coercive Diplomacy*

Penerapan sanksi oleh Swiss terhadap Rusia sejak tahun 2022 menjadi titik balik penting dalam sejarah kebijakan luar negeri Swiss. Sebagai negara yang secara konstitusional menetapkan netralitas permanen, keputusan untuk mengikuti paket sanksi yang ditetapkan Uni Eropa merupakan langkah yang secara historis dan politis sangat signifikan. Sanksi tersebut dimulai pada Februari 2022, tepat setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina. Swiss mengadopsi pembekuan aset terhadap individu dan entitas yang masuk daftar sanksi UE, larangan ekspor teknologi militer, serta pembatasan layanan keuangan. Hingga awal 2024, Swiss telah mengikuti 12 paket sanksi yang ditetapkan Uni Eropa dengan menyesuaikan sebagian kebijakan berdasarkan kepentingan nasionalnya.

Data ini menggarisbawahi bahwa Swiss, meskipun memiliki tradisi panjang dalam netralitas, turut serta secara aktif dalam menjatuhkan sanksi

terhadap Rusia, menandai perubahan penting dalam kebijakan luar negerinya. Statistik ini memperkuat argumen bahwa Swiss mengambil langkah strategis dalam merespons invasi Rusia ke Ukraina, selaras dengan pendekatan negara-negara Barat lainnya dalam menerapkan tekanan non-militer.

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran strategi politik luar negeri Swiss, dari sekadar menjaga jarak netral terhadap konflik internasional menjadi partisipatif secara diplomatik, namun tetap dalam koridor non-militer. Hal ini sejalan dengan pandangan Realisme Defensif, yang menyatakan bahwa negara akan mengambil langkah strategis untuk mempertahankan status quo keamanan mereka dalam sistem internasional yang anarkis, tanpa niat ekspansi atau dominasi.¹ Swiss, dalam hal ini, merespons ancaman ketidakstabilan regional yang ditimbulkan oleh Rusia dengan strategi yang bersifat defensif dan rasional, yaitu penerapan tekanan ekonomi.

Dalam realisme defensif, keputusan Swiss dipahami sebagai langkah untuk mempertahankan reputasi dan integritas sistem internasional, di mana Swiss berperan sebagai penengah yang kredibel. Pandangan ini juga dikuatkan oleh Robert Jervis, yang menekankan bahwa negara akan lebih cenderung untuk menghindari eskalasi dan konflik langsung, dan lebih memilih upaya penyeimbangan strategis dalam bentuk koalisi atau diplomasi koersif yang terukur. Swiss dalam hal ini memanfaatkan kekuatan non-militer, seperti pengaruh keuangan dan keanggotaan dalam sistem ekonomi internasional, untuk menciptakan tekanan terhadap Rusia, tanpa mengorbankan prinsip non-intervensi.

Salah satu dimensi penting dari diplomasi koersif adalah kredibilitas ancaman yang dilakukan oleh negara pengirim sanksi. Dalam konteks Swiss, kredibilitas ini diperoleh bukan melalui kekuatan militer, tetapi melalui

¹ Mearsheimer, J. J. (2007). Structural realism. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith (Eds.), *International relations theories: Discipline and diversity* (pp. 83–107). Oxford University Press.

reputasinya sebagai pusat keuangan global.² Ketika Swiss membekukan aset senilai lebih dari CHF 7,5 miliar milik warga dan perusahaan Rusia pada akhir 2023, hal ini menjadi simbol bahwa Swiss dapat mengambil langkah keras secara hukum dan ekonomi, walau tetap berada dalam posisi netral secara militer.

Selanjutnya, dari sudut pandang proporsionalitas, Swiss tidak serta-merta mengadopsi seluruh kebijakan sanksi UE secara mutlak. Terdapat kebijakan-kebijakan tertentu yang dimodifikasi atau dikecualikan, seperti kebijakan transfer obat-obatan dan teknologi sipil³. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara upaya memberi tekanan kepada Rusia dan upaya menjaga stabilitas dalam negeri serta kepentingan nasional. Menurut Jentleson, diplomasi koersif yang berhasil membutuhkan kalibrasi yang tepat dalam pemberian tekanan dan kemungkinan insentif, yang keduanya tampak dalam cara Swiss menyesuaikan implementasi sanksinya.

Pendekatan ini juga berkaitan erat dengan prinsip *reciprocity*, di mana Swiss tidak hanya bertindak sepihak tetapi selaras dengan komunitas internasional. Walau bukan anggota Uni Eropa, Swiss berupaya menunjukkan solidaritas normatif terhadap tindakan kolektif UE tanpa harus mengorbankan kedaulatan keputusan politiknya. Hal ini menunjukkan bagaimana negara dapat menggunakan diplomasi koersif dalam kerangka multilateral tanpa kehilangan independensi kebijakan.

Para ahli kebijakan luar negeri Swiss juga menekankan bahwa keputusan sanksi ini diambil melalui mekanisme koordinasi antara *Federal Council*, FDFA, dan SECO, dengan mempertimbangkan masukan dari mitra dagang utama dan masyarakat sipil⁴. Proses ini mencerminkan bentuk

² George, A. L., Simons, W. E., & Hall, D. K. (1994). *The limits of coercive diplomacy* (Vol. 296). Boulder, CO: Westview Press.

³ Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO). (2023). *Implementation of sanctions*. Swiss Confederation. <https://www.seco.admin.ch>

⁴ Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). (2022). *Sanctions against Russia and Belarus*. Swiss Confederation. <https://www.eda.admin.ch>

strategic restraint yang digambarkan dalam realisme defensif, di mana negara bertindak berdasarkan kalkulasi jangka panjang daripada reaksi impulsif terhadap tekanan eksternal.

Dengan demikian, keputusan Swiss untuk menerapkan sanksi terhadap Rusia bukanlah bentuk agresi politik atau upaya perubahan struktur kekuatan internasional, melainkan strategi defensif untuk menegakkan norma internasional, melindungi kepentingan ekonomi nasional, dan mempertahankan stabilitas kawasan. Realisme defensif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi rasional Swiss sebagai negara kecil dengan posisi strategis yang unik di Eropa.

Lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa dalam realisme defensif, negara bukan hanya aktor rasional yang bertujuan mempertahankan eksistensinya, tetapi juga menanggapi perubahan dinamika internasional dengan cara yang seimbang. Swiss, dalam konteks ini, menunjukkan bahwa strategi diplomasi koersif tidak selalu identik dengan tindakan agresif, tetapi dapat berupa upaya represif non-militer yang tetap menjaga posisi moral dan legal suatu negara. Oleh karena itu, penerapan sanksi oleh Swiss dilihat sebagai cara mengartikulasikan sikap politik tanpa harus terlibat langsung dalam konflik bersenjata, selaras dengan pendekatan strategis defensif yang mengedepankan stabilitas kawasan dan konsistensi nilai dalam politik luar negerinya.

Dengan mendasarkan analisis pada teori realisme defensif dan kerangka diplomasi koersif, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana Swiss sebagai negara netral dapat memainkan peran signifikan dalam sistem internasional melalui strategi non-militer yang terukur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami rasionalitas Swiss dalam menavigasi tekanan internasional, menjaga netralitasnya, serta memberikan kontribusi terhadap stabilitas kawasan. Kebijakan sanksi Swiss terhadap Rusia selama 2022–2024 tidak hanya menjadi representasi adaptasi terhadap perubahan global, tetapi juga menunjukkan bahwa dalam politik

internasional modern, netralitas tidak berarti pasif, melainkan aktif dalam bentuk yang diplomatis dan konstruktif.

Respon Global

Respon global terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 ditandai dengan mobilisasi kolektif negara-negara Barat dan kawasan Eropa melalui penerapan sanksi ekonomi dan diplomatik yang luas. Uni Eropa memimpin langkah ini dengan menjatuhkan serangkaian paket sanksi yang menyoroti sektor perbankan, energi, dan perdagangan Rusia. Sanksi tersebut bertujuan melemahkan kapasitas Rusia dalam membiayai perang sekaligus memberikan tekanan diplomatik melalui isolasi politik. Langkah ini kemudian diikuti oleh negara-negara Barat lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, yang bersama-sama membentuk front internasional melawan agresi Rusia.

Dampak sanksi tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memengaruhi dinamika hubungan diplomatik global. Rusia semakin terisolasi dari forum-forum internasional, sementara negara-negara Barat berupaya menjaga solidaritas transatlantik dalam menghadapi krisis ini. Strategi kolektif tersebut memperlihatkan pergeseran dari diplomasi dialog ke diplomasi koersif, yang menggunakan tekanan non-militer untuk memengaruhi perilaku Rusia. Dalam hal ini, sanksi diposisikan sebagai instrumen politik luar negeri yang lebih fleksibel dibandingkan penggunaan kekuatan militer langsung.

Bagi Swiss, respon global ini memiliki signifikansi strategis. Sebagai negara yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Uni Eropa sekaligus memegang status netralitas, Swiss menghadapi dilema antara mempertahankan prinsip netralitas atau mengikuti langkah kolektif Eropa. Pada akhirnya, keputusan Swiss untuk mengadopsi sanksi terhadap Rusia menunjukkan bahwa tekanan internasional, khususnya dari mitra Eropa, menjadi faktor penting dalam memengaruhi arah kebijakan luar negeri Swiss.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan sanksi yang diterapkan Swiss terhadap Rusia pada periode 2022–2024 dapat dikategorikan sebagai bentuk coercive diplomacy. Sebagai negara dengan tradisi panjang netralitas, keputusan Swiss untuk mengadopsi paket sanksi Uni Eropa merupakan langkah signifikan yang menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap prinsip netralitas. Hal ini menandakan bahwa Swiss tidak lagi memandang netralitas sebagai sikap pasif, melainkan sebagai instrumen fleksibel yang memungkinkan keterlibatan politik luar negeri dalam merespons dinamika geopolitik internasional.

Dalam kerangka teori realisme ofensif, langkah Swiss dapat dipahami sebagai strategi untuk mempertahankan posisi dan relevansi dalam sistem internasional yang semakin kompetitif. Realisme ofensif menekankan bahwa negara berusaha memaksimalkan kekuatan relatifnya untuk menjamin kelangsungan hidup. Namun, dalam konteks Swiss, kebijakan sanksi tidak diarahkan pada upaya dominasi atau ekspansi kekuasaan militer, melainkan pada perluasan pengaruh politik dan diplomatik di kawasan Eropa. Dengan kata lain, Swiss menggunakan sanksi sebagai instrumen non-militer untuk memperkuat posisi strategisnya di antara negara-negara Barat.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa Swiss merumuskan kebijakan sanksi sebagai bentuk respons rasional terhadap tekanan internasional, terutama dari Uni Eropa. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri Swiss sangat dipengaruhi oleh faktor interdependensi ekonomi dan politik dengan negara-negara Eropa. Dengan demikian, keputusan Swiss lebih merupakan bentuk kalkulasi strategis untuk menjaga stabilitas kawasan dan mempertahankan hubungan internasional yang saling menguntungkan, dibandingkan dengan dorongan hegemonik yang sering diasosiasikan dengan realisme ofensif dalam arti klasik.

Lebih jauh, penerapan sanksi oleh Swiss dapat dipandang sebagai upaya menegaskan peran dan kredibilitasnya di panggung global. Melalui kebijakan tersebut, Swiss menunjukkan bahwa prinsip netralitas tidak identik dengan

ketidakaktifan. Sebaliknya, netralitas dapat dijalankan secara adaptif melalui instrumen non-militer seperti sanksi ekonomi, sehingga tetap konsisten dengan norma internasional sekaligus memberikan tekanan terhadap Rusia. Dengan demikian, Swiss menggunakan netralitas adaptif untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap tradisi politik luar negeri dan tuntutan realitas geopolitik kontemporer.

Meskipun menggunakan kerangka realisme ofensif, penelitian ini menemukan bahwa motivasi Swiss tidak sepenuhnya sejalan dengan upaya memaksimalkan kekuasaan, melainkan lebih pada strategi defensif untuk memperluas pengaruh. Sanksi yang dijatuhkan bukanlah instrumen untuk mencapai dominasi global, tetapi sebagai sarana mempertahankan stabilitas kawasan, menjaga kepentingan ekonomi, serta memastikan posisi Swiss tetap diperhitungkan dalam struktur politik internasional. Dengan kata lain, kebijakan sanksi Swiss merefleksikan bentuk *selective power maximization* yang berorientasi pada pengaruh diplomatik, bukan supremasi militer.

Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan sanksi Swiss terhadap Rusia pada 2022–2024 merupakan ilustrasi penting bagaimana sebuah negara netral menavigasi tantangan geopolitik melalui strategi *coercive diplomacy*. Dengan menggunakan perspektif realisme ofensif, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi untuk memperluas pengaruh dan relevansi internasional, tanpa harus meninggalkan prinsip dasar netralitas. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus mengenai dinamika netralitas di era kontemporer, khususnya bagaimana negara kecil sekalipun tetap mampu memainkan peran strategis melalui instrumen non-militer.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- George, A. L., Simons, W. E., & Hall, D. K. (1994). *The limits of coercive diplomacy* (Vol. 296). Boulder, CO: Westview Press.
- Heller, M. (2022). The evolution of Swiss neutrality: Historical perspectives and contemporary challenges. *Swiss Journal of International Studies*, 9(1), 12–29.
- Jentleson, B. W. (2006). Coercive diplomacy: Scope and limits in the contemporary world. *The Stanley Foundation*, 1–12.
- Mearsheimer, J. J. (2007). Structural realism. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith (Eds.), *International relations theories: Discipline and diversity* (pp. 83–107). Oxford University Press.
- Müller, A. (2023). Swiss neutrality and economic sanctions: A new paradigm? *European Security Review*, 12(1), 23–39.
- Saeri, R. I., Sumaryo, S., & Sihidi, I. T. A. (2023). Konflik Rusia-Ukraina: Strategi Rusia sebagai Great Power dalam perspektif realisme ofensif. *Jurnal Dinamika Global*, 8(2), 253–270.
- Scazzieri, L. (2017). Europe, Russia and the Ukraine crisis: The dynamics of coercion. *The Journal of Strategic Studies*, 40(3), 392–416.
<https://doi.org/10.1080/01402390.2017.1288106>
- Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). (2022). *Sanctions against Russia and Belarus*. Swiss Confederation.
<https://www.eda.admin.ch>
- Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). (2023). *Switzerland's adoption of EU sanctions*. Swiss Confederation.
<https://www.eda.admin.ch>
- Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO). (2023). *Implementation of sanctions*. Swiss Confederation.
<https://www.seco.admin.ch>

Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. McGraw-Hill.